

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1. Teks**

- **Representasi**

Menggambarkan kondisi dan situasi yang akan dihadapi oleh masyarakat jika hukum hanya berpihak pada para pemegang modal.

- **Relasi**

Tingkatan ini wacana-wacana diperlihatkan secara terbuka; jelas membahas topik yang diangkat. Tapi, ada juga teks yang bersifat tertutup (tidak mendekati realitas sesungguhnya).

- **Identifikasi**

Wartawan mengidentifikasi dirinya memiliki sudut pandang yang sama dengan narasumber terhadap persoalan yang diangkat, sudut pandang tersebut dapat terlihat dari pendapat Margarito Kamis yang dikutip dalam berita.

##### **5.1.2. Praktik Wacana**

Hubungan wartawan dengan sesama *staff* redaksi berlangsung interaktif dan komunikatif. Wartawan serta Redaktur Politik memiliki pandangan tersendiri terhadap isu *Omnibus Law* RUU Cipta kerja.

### 5.1.3. Praktik Sosio-Kultural

- **Situasional**

Berita harian umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 dengan judul "omnibus Law jangan Untuk Para kapitalis" dimuat saat penyerahan *draft* RUU Cipta kerja oleh pemerintah kepada DPR RI.

- **Institusional**

Berita harian umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 dengan judul "omnibus Law jangan Untuk Para kapitalis" merupakan ide yang murni berasal dari wartawan pikiran rakyat bukan sebuah berita pesanan atau intervensi pihak manapun.

- **Sosial**

*Omnibus Law* Cipta kerja berpotensi mengangku banyak kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, produk hukum ini disinyalir hanya menguntungkan para pemegang modal atau para Kapitalis dengan sistem mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kolonialisme sedangkan Pancasila bertentangan dengan kolonialisme atau imperialisme.

### 5.1.2 Kesimpulan Makro

- Teks ini merupakan prediksi Pikiran Rakyat bahwa *Omnibus Law* RUU Cipta kerja merupakan produk hukum yang dibuat untuk mempermudah jalan para kapitalis memulai bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pendapat Margarito Kamis yang dimasukkan ke dalam berita. Teks ini menjadi sebuah informasi dari Pikiran Rakyat untuk memberitahu

bahwa isu yang diangkat oleh harian umum Pikiran Rakyat ini cukup penting. Harian umum Pikiran Rakyat menilai, isu ini merupakan isu yang hangat juga di dalam *Omnibus Law* RUU Cipta kerja terdapat banyak kepentingan di luar dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal tersebut cukup kentara melalui pasal-pasal yang mengalami pembaharuan, salah satunya adalah perubahan jam kerja buruh yang tidak selaras dengan perubahan sistem upah. Buruh semakin dijadikan alat untuk memperkaya golongan pemilik modal tanpa memikirkan kelangsungan nasib buruh itu sendiri.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran Untuk Pikiran Rakyat**

Pada bulan Februari 2020 mengenai omnibus Law tidak begitu sering dibahas oleh harian umum Pikiran Rakyat, jika hak-hak buruh yang terpinggirkan dan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja yang diperuntukkan bagi Para Kapitalis menjadi konsen yang harus terus dikaji dan dipantau, maka seharusnya berita mengenai *Omnibus Law* RUU Cipta kerja memiliki ruang yang lebih luas untuk diberitakan.

### **5.2.2. Saran Untuk Masyarakat**

Masyarakat diharapkan lebih jeli dan kritis dalam membaca berita di media karena sesungguhnya tujuan media itu untuk membentuk persepsi umum. Ada baiknya masyarakat melakukan penelusuran penelusuran mendalam sehingga informasi yang didapat akan menjadi lebih lengkap terutama jika harus membaca berita dengan paragraf

singkat yang tidak mencerminkan atau menjelaskan secara detail mengenai permasalahan yang diangkat.

### **5.2.3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

Sebelum melakukan penelitian mengenai Analisis wacana kritis, pastikan telah memiliki ketertarikan pada metodologi ini sehingga peneliti memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan analisa terhadap kasus lalu mencari keterkaitannya dengan metodologi.

### **5.2.4. Saran Untuk Pemerintah**

Membuat sebuah peraturan haruslah berdasarkan kebutuhan sosiologis dari masyarakat yang berada pada negara tersebut, pemerintah diharapkan lebih mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pandangan juga aspirasi mengenai *Omnibus Law* RUU Cipta kerja sehingga sikap masyarakat tidak terpecah dalam mendukung *Omnibus Law* RUU Cipta kerja.